



Judul : Mampukah Negara Terapkan Lockdown Untuk Menghentikan Pandemi Covid-19
Tanggal : Sabtu, 31 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Mampukah Negara Terapkan Lockdown Untuk Menghentikan Pandemi Covid-19

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berlaku hingga 2 Agustus. Bersamaan dengan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut, sejumlah aturan dilonggarkan.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pelonggaran seperti ini, merupakan "jalan tengah" yang akan membuat pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi lebih sulit.

Sehingga, Jusuf Kalla mendorong adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown. Tapi dengan satu syarat, pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. "Semua masyarakat yang tidak mampu, harus disubsidi. Minimal, Rp 1 juta per bulan," ucap JK, Minggu (25/7).

Menurut JK, rumah tangga di Indonesia ada 60 juta. Misalnya yang tidak mampu 30 persen, berarti 20 juta. Maka, mereka harus dikasih Rp 1 juta per bulan. Berarti, negara harus mengeluarkan Rp 60 triliun per bulan selama 6 bulan.

"Kalau itu dilakukan, saya kira pandemi ini bisa terpotong. Itu lebih baik, daripada selalu ambil jalan tengah," tandas Ketua Umum Partai Merah Indonesia (PMI) ini.

Saat ini, bantuan tunai yang diberikan kepada warga terdampak pandemi, sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menurut JK, angka ini tidak cukup bagi kebutuhan pangan mereka.

Kalau satu keluarga diberi Rp 1 juta, lanjut JK, berarti bisa membeli beras 100 kilogram (kg).

Yang membeli beras hanya 25 kg, butuhnya Rp 250 ribu. Sisanya bisa untuk membeli kebutuhan pokok yang lain. "Pasti tidak menyenangkan. Tapi, ini jalan keluar untuk penyelesaian," saran Wakil Presiden 2014-2019 ini.

Mensurutnya, Rp 1 juta itu cukup. Petani kecil, JK mencontohkan, pendapatannya sebulan Rp 1 juta sekeluarga. "Cukup dalam arti bisa makan. Tak akan kelaparan. Tentu tak bisa beli baju dan lain-lain," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, JK menyarankan agar menggunakan satu sistem bantuan sosial (bansos) saja untuk mempermudah administrasi. Sehingga, penyampaian bansos tunai bisa lebih fokus. "Terlalu banyak kartu. Yang lain stop dulu. Supaya, tidak ribet administrasinya," tandas JK.

PPKM Level 3-4 sedang berlangsung. Namun, Pemerintah memberikan kelonggaran, seperti aturan makan di tempat selama 20 menit bagi warung makan/warteg, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Di satu sisi, pelonggaran ini meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, berisiko pandemi Covid-19 akan semakin besar. Dalam konteks inilah JK menyarankan Pemerintah memberikan Rp 1 juta per bulan itu, untuk mengambil kebijakan lockdown.

Berikut ini pandangan Anggota Komisi Keuangan (XI) DPR dari PDIP Hendrawan Supratikno, dan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Dokter Tri Yunis Miko Wahyono mengenai saran JK itu.